



PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA) 2019

DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH

KATA PENGANTAR

Pembangunan ketahanan pangan merupakan prioritas utama pembangunan nasional. Dengan demikian program ini memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan ketahanan nasional yang kuat dan tangguh. Secara umum tujuan dari ketahanan pangan harus diorientasikan untuk pencapaian pemenuhan hak atas pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan ketahanan pangan nasional. Berjalannya sistem ketahanan pangan tersebut sangat tergantung pada adanya kebijakan dan kinerja sektor yang terkait dengan program ketahanan pangan.

Kebijakan pemerintah dalam aspek ekonomi, sosial maupun politik sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan nasional dan daerah. Dengan berpedoman kepada rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh tahun 2017 - 2022 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2017 - 2022, maka disusunlah Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2019.

Rancangan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja - PD) ini memuat antara lain ; potensi, kondisi saat ini, sasaran, arah kebijakan, program serta rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 serta rencana indikatif pendanaannya.

Perubahan Renja-PD ini kiranya dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan rencana pembangunan Ketahanan Pangan ke depan sesuai amanat UU No 18 Tahun 2012, sehingga pada akhirnya dapat mewujudkan kedaulatan dan kemandirian pangan.

Payakumbuh, Agustus 2019
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	1
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	4
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	5
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2019	7
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD	7
2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD	16
2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD	18
BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN.....	26
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	26
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA	28
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN YANG MENGALAMI PERUBAHAN TH 2019	29
BAB IV PENUTUP	35
LAMPIRAN I Rencana program dan kegiatan prioritas daerah Kota Payakumbuh Perubahan Tahun Anggaran 2019 sumber dana APBD Kota Payakumbuh	
LAMPIRAN II Evaluasi pelaksanaan renja SKPD tahun 2018 dan capaian Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh	

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana kerja (Renja) Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 dan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2017-2022. Dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh, di samping mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) juga memperhatikan kebijakan dari Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian dan mengakomodir aspirasi dari masyarakat melalui kegiatan musrenbang serta isu-isu strategis lainnya/di bidang ketahanan pangan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 Tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Payakumbuh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembar Negara RI Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2014 - 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3)
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 701);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 2);
16. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010 Nomor 3);
17. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota

- Payakumbuh Tahun 2010 – 2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7).
 19. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
 20. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1);
 21. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 42 Tahun 2019 Tentang perubahan kedua atas Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 111 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2019 Nomor 42);

1.3. Maksud dan Tujuan

a. Maksud Penyusunan Renja SKPD

Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dimaksudkan untuk :

- a. Menetapkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang dimiliki
- b. Memahami dengan lebih baik lingkungan internal dan eksternal Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh sehingga terjadi interaksi aktif dalam pelaksanaan tugas

- c. Menganalisa dan mengkaji secara rinci faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh berdasarkan pemahaman tentang lingkungan internal dan eksternal
- d. Menetapkan kebijakan strategis, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai

b. Tujuan Penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah

Rencana Kerja Perubahan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2019 disusun dengan tujuan :

- a. Mengantisipasi perubahan lingkungan global yang terjadi begitu cepat seperti perkembangan teknologi dan informasi, sementara sumber daya yang tersedia begitu terbatas. Dengan adanya rencana strategis, organisasi dapat mengambil tindakan yang tepat dan cepat sesuai dengan kondisi perubahan yang terjadi.
- b. Memperoleh hasil yang optimal dengan menggunakan sumber daya yang tersedia
- c. Mengetahui orientasi organisasi di masa yang akan datang
- d. Untuk meningkatkan komunikasi di antara anggota organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I. Pendahuluan

Bab ini memaparkan mengenai latar belakang penyusunan Renja, landasan hukum penyusunan Renja, maksud dan tujuan penyusunan dan sistematika penulisan.

BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu

Bab ini memaparkan tentang evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaiannya terhadap Renstra SKPD, memaparkan tentang analisis kinerja pelayanan SKPD dan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan.

BAB III. Rencana Program dan Kegiatan Perubahan Pendanaan

Bab ini memaparkan tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tentang tujuan dan sasaran dari penyusunan Renja, tentang program dan kegiatan yang akan direncanakan dilakukan perubahan pada tahun 2019 berikut dengan kebutuhan dana yang diinginkan.

BAB IV. Penutup

Bab ini memaparkan tentang hal-hal yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaan kegiatan maupun mengenai ketersediaan anggaran, selain itu juga memuat kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut

II. EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SKPD TAHUN 2019

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Berjalan dan Capaian Renstra SKPD

Secara umum Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tanggung jawab instansi. Dari empat program yang ditetapkan, semua sedang berjalan, tingkat keberhasilannya belum dapat diwujudkan secara optimal. Perumusan keberhasilan pencapaian jika dibandingkan dengan indikator keberhasilannya dapat terealisasi 40 %.

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian program:

Terlaksananya kelancaran program administrasi perkantoran dengan capaian 100 %

Kegiatannya:

- **Penyediaan Jasa Surat Menyurat**

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat berupa penyediaan materai pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.669.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.170.000,- atau 43,84%.

- **Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik**

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik berupa penyediaan jasa telekomunikasi/internet, air dan listrik pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 23.400.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.095.869,- atau 17,50%.

- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa perbaikan/servis 29 unit, pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 4.800.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.565.750,-
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional berupa pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor 9 unit kendaraan dinas Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh yaitu 3 unit kendaraan roda empat dan 6 unit kendaraan roda dua. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.580.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 0
- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan berupa penyediaan pembayaran honorarium pengelola administrasi keuangan Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 246.348.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 83.216.321,-.
- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor berupa penyediaan bahan dan peralatan kebersihan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.456.015,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.191.605,-
- Penyediaan Alat Tulis Kantor
Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor berupa penyediaan alat tulis kantor pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.700.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.816.700,-

- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan berupa pengadaan barang cetak, penggandaan dan penjilidan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.004.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.747.500,- .
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor berupa pembelian lampu esensial, baterai kering kecil, stop kontak dan kabel nilit pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.711.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.450.500,-
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor berupa pembelian 3 unit peralatan kantor pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 13.650.000,-
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan berupa penyediaan surat kabar yaitu Padang Ekspres, Haluan, Trubus, untuk Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.440.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.480.000,-
- Penyediaan Makanan dan Minuman
Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman berupa penyediaan makan dan minum rapat dan makan dan minum tamu pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran

sebesar Rp. 10.037.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 4.488.000,- atau 44,71% .

- Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah berupa penyediaan biaya perjalanan dinas dalam maupun luar daerah Provinsi Sumatera Barat bagi PNS Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dalam rangka mengikuti rapat-rapat koordinasi dan konsultasi. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 241.830.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 97.268.874,- atau 40,22%.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian Program :

Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana kantor .

Kegiatannya:

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional berupa penyediaan jasa servis, penggantian suku cadang, bahan bakar minyak dan pelumas 11 unit kendaraan dinas/operasional pada Kantor Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 67.522.600,- dan terealisasi sebesar Rp. 24.631.050,- atau 36,48 %

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan penyediaan Pakaian dinas beserta perlengkapan. Sebanyak 30 stel. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 13.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 11.250.000,- atau 83,33%

D. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Capaian Program :

Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

- Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD.

Kegiatan ini berupa Penyusunan LAKIP, LKPJ, Pelaporan bulanan dan laporan lainnya. Kegiatan penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD ini meliputi honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, belanja penggandaan, belanja penjilidan dan belanja makan minum rapat. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.404.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,-

- Kegiatan Penyusunan Dokumen perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik

Kegiatan ini berupa Penyusunan Rencana Kerja SKPD, Standar pelayanan Minimal, Indeks kepuasan Masyarakat, SPP , Standar Operasional Prosedur dan lain-lain. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Pelayanan Publik ini meliputi honorarium panitia pelaksana kegiatan, belanja alat tulis kantor, belanja penggandaan, belanja penjilidan dan belanja makan dan minum rapat. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 3.564.165,- dan terealisasi sebesar Rp.1.476.625,-

E. Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan

Kegiatannya:

1. Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan

Kegiatan ini berupa penyusunan kebijakan perencanaan pangan untuk mengukur ketersediaan energi masyarakat yang ditetapkan secara detil sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan ketersediaan protein sebesar 63 gr/kap/hari dan melakukan penyusunan buku Neraca

Bahan Makanan (NBM) sebanyak 25 buku dan buku Pola Pangan Harapan (PPH) sebanyak 25 buku. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 14.506.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.568.400,- atau 10,81 %.

2. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan
Kegiatan ini berupa pelaksanaan Sekolah Lapang (SL), penyaluran benih sayuran dan pupuk kandang, studi banding KWT dan pendamping berprestasi dan pelatihan budidaya sayuran pada 5 Kelompok Wanita Tani (KWT) yaitu KWT Lumbuang Barasoki Kecamatan Payakumbuh Barat, KWT Rosella Kecamatan Payakumbuh Utara, KWT Jaya Mandiri Kecamatan Payakumbuh Selatan, KWT Sumua Paraku Kecamatan Payakumbuh Timur dan KWT Sei Tabia Kecamatan Latina. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 713.134.400,- dan terealisasi sebesar Rp. 0,-
3. Pemantauan dan Analisis akses Harga Pangan Pokok
Kegiatan ini berupa pemantauan harga pangan pada tingkat produsen, pedagang dan konsumen serta analisis harga pangan di tingkat Kota dan Kecamatan se-Kota Payakumbuh setiap minggu pada tahun 2019. Output dari kegiatan ini menghasilkan buku tentang laporan dan analisis harga pangan sebanyak 10 unit, data distribusi dan harga pangan masyarakat Kota Payakumbuh Tahun 2019. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.866.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.872.875,- atau 32,40%
4. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
Kegiatan ini berupa pelaksanaan pekerjaan Penyediaan Beras Cadangan Pangan Pemerintah yang bekerjasama dengan Perum Bulog Subdivre Bukittinggi yang penyalurannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota

Payakumbuh No. 35 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Kota Payakumbuh dengan tujuan kegiatan untuk mengantisipasi gejolak/stabilitas harga pangan, kekurangan pangan, menghadapi keadaan darurat, bencana alam dan bencana sosial. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 32.788.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 3.043.400,- atau 9,28% .

5. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Kegiatan ini berupa pembinaan terhadap 6 kelompok penerima Program Desa Mandiri Pangan yakni kelompok Afinitas Sejahtera Kelurahan Koto Panjang Dalam Kecamatan Latina, Kelompok Afinitas Suka Maju, Kelompok Afinitas Sepakat Bersama di Kelurahan Ikua koto di Balai Kecamatan Payakumbuh Utara, Kelompok Bunga Kelurahan Tiakar Kecamatan Payakumbuh Timur dan Kelompok Afinitas Mandiri Pangan Kelurahan Limo Kampuang Kecamatan Payakumbuh Selatan. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 43.041.520,- dan terealisasi sebesar Rp. 25.547.750,- atau 59,36% .

6. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Kegiatan ini berupa uji sampel pangan masyarakat yang beredar di masyarakat serta lomba cipta menu tingkat Kota Payakumbuh dan provinsi Sumatera Barat. Kegiatan ini untuk menjawab keresahan masyarakat saat ini ditengah maraknya pengguna bahan makanan berbahaya, sehingga dapat memantau keamanan pangan segar yang dikonsumsi masyarakat dan jajanan anak sekolah yang sehat. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 100.776.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 17.754.700,- atau 17,62%

7. Koordinasi Pengkajian Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan

Kegiatan ini berupa verifikasi Adhikarya Pangan Nusantara (APN) tingkat Kota Payakumbuh, verifikasi/penilaian Lomba Ketahanan Pangan tingkat Provinsi, rapat koordinasi Dewan Ketahanan Pangan (DKP), verifikasi/penilaian Lomba Ketahanan Pangan tingkat Nasional dan mengikuti pameran Hari Pangan Sedunia (HPS). Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 54.036.450,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.339.400,- atau 2,48% .

8. Pengembangan dan Pembinaan Pangan Lokal Non Beras dan Non Terigu

Kegiatan ini berupa Lomba Pengolahan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu dan launching Pengolahan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu bagi anggota KWT dan Dasawisma di Kota Payakumbuh untuk mengikuti Lomba Cipta Menu tingkat Sumatera Barat tahun 2019 .Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.304.299,- dan terealisasi sebesar Rp. 26.285.100,- atau 68,62 %.

9. Koordinasi Pengawasan Pembinaan dan Pemantauan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)

Kegiatan ini berupa pembinaan/pelatihan kepada kelompok tani dan penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) dengan memberdayakan Gapoktan dalam usaha distribusi pangan pokok terutama dalam memperkuat permodalan dan mengembangkan prasarana lumbung pangan. Pengelolaan program ini dilaksanakan oleh Gapoktan Tigo Sapilin Kelurahan Padang Alai Bodi Kecamatan Payakumbuh Timur. Dilaksanakan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 8.892.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.056.500,- atau 11,88%

Tabel 1
Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Penyelenggaraan Urusan Ketahanan Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh
Tahun Anggaran 2019
Triwulan I dan II

No	Program/Kegiatan	Input			Output		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
A PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN							
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.669.000	1,170.000	43,84	materai 626buah	materai 252buah	45,87
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	23.400.000	4.095.869	17,50	3 rekening	3 rekening	22,20
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4,800.500	1,565.750	32,62	29 unit	12 unit	26,58
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2.580.000	0	0	9 unit	0 unit	0
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	246.348.000	83.216.321	33,78	32 org	32 orang	30,82
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	2.456.015	1.191.605	48,52	21 jenis	14 jenis	44,57
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	10.700.600	4.816.700	45,01	34 item	20 item	37,39
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.004.400	4.747.500	47,45	86 bk;	30 buku	29,99
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	1.711.750	1.450.500	84,74	7 jenis	7 jenis	46,23
10	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor	14.000.000	13.650.000	97,50	3 unit	3 unit	50,38
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	10.440.000	3.480.000	33,33	4 media	4 media	100
12	Penyediaan Makanan dan Minuman	10,037,500	4.488.000	44,71	730 porsi	448porsi	27,85
13	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	241.830.000	97.268.874	40,22	170 oh, 108 oh	58 OH	37,47
B PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR							
1	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	67.522.600	24.631.050	36,47	11 unit	9 unit	75
C. PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR							
1	Pengadaan pakaian Dinas beserta kelengkapannya	13.500.000	11.250.000	83,33	30 stel	25 stel	90
C PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN							
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan iktisar realisasi kinerja SKPD	3.404.400	0	0	3 laporan	3 laporan	100
1	Penyusunan dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	3.564.165	1.476.625	41,42	4 dok	4 dok	100
E PROGRAM KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN							
1	Analisis dan Penyusunan Pola Konsumsi dan Suplai Pangan	14.506.000	1.568.400	10,81	25 buku	0 buku	0
2	Pemantauan dan Analisis Akses Harga Pangan Masyarakat	8.866.500	2.872.875	32,40	52 minggu, 1 dokumen (10 buku)	-	0
3	Pengembangan Cadangan Pangan Daerah	32.788.000	3.043.400	9,28	1 paket	-	0
4	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	43.041.520	25.547.750	59,35	6 Kelompok, 1 desa	6 Kelompok, 1 desa	100
5	Koordinasi Pengkajian Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan	54.036.450	1.339.400	2,47	2 kali, 1 kali, 1 kali	-	0
6	Koordinasi Pengawasan Pembinaan dan Pemantauan Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM)	8.892.000	1.056.500	11,88	30 org, 30 org	30 orang	100
F. PROGRAM DIVERSIFIKASI DAN KEAMANAN PANGAN							
1.	Pemanfaatan Pekarangan untuk pengembangan pangan	713.134.400	0	0	5 kwt, 5 kwt, 25 dasawisma,	0	0

					3 kelurahan, 1 dokumen		
2	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	100.776.000	17.754.700	17,61	2 kali, 4 kali, 30 org, 30 org	0 kali, 2 kali, 30 org, 30 org	50
3.	Pengembangan dan pembinaan pangan lokal non beras non terigu	38.304.299	26.285.100	68,62	30 org, 1 kali	30 org, 1 kali	
	JUMLAH	1.683.314.099	337.966.919				
CAPAIAN KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN							20,08

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Akuntabilitas kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan pelaksanaan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran, tujuan dan misi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh. Penilaian akuntabilitas kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator hasil dan indikator keluaran yang merupakan indikator mikro dalam pencapaian sasaran.

Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2019 yang dilaksanakan melalui Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan dan Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan . Berdasarkan penetapan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2019 dengan 5 (lima) indikator, sasaran/ target sebagai tolak ukur dalam hal pencapaian kinerja adalah sebagai berikut:

1. Skor PPH Ketersediaan
2. Stabilitas Harga
 - Beras
 - Cabe
 - Bawang
3. Stabilitas Pasokan
4. Skor PPH Konsumsi
5. Tingkat Keamanan Pangan

1. Terpenuhinya ketersediaan pangan yang cukup

Ketersediaan energi dibedakan kepada 2 (dua) kelompok yaitu: kelompok pangan nabati dan kelompok pangan hewani. Ketersediaan energi untuk di konsumsi penduduk Kota Payakumbuh pada tahun 2014 adalah sebesar 4.308,65 kkal/kap/hr, dimana 3.965,75 kkal (92,04%) berasal dari pangan nabati dan 342,90 kkal (7,96%) berasal dari pangan hewani.

2. Terwujudnya harga pangan strategis.

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat, yang tercermin dari stabilnya harga pangan pokok dan meningkatnya pengelolaan cadangan pangan dan lembaga distribusi pangan. Dalam hal ini sesuai dengan indikator sasaran yaitu melaksanakan pemantauan selama tahun 2019.

3. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan.

Sesuai dengan indikator penetapan kinerja yang ditargetkan untuk penumbuhan Desa Mandiri Pangan sebanyak 6 (enam) kelompok pada 4 (empat) kelurahan ini dapat terealisasi 100%, melalui kegiatan Pengembangan Desa Mandiri Pangan (DMP) merupakan suatu kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat miskin dengan tujuan pemberdayaan masyarakat miskin sehingga ketersediaan pangannya dapat terpenuhi.

4. Mengeliminir kondisi rawan pangan.

Sesuai dengan indikator penetapan kinerja dengan sasaran agar pemerintah daerah dapat secepatnya mendeteksi kerawanan pangan secara dini sehingga berkurang kasus kerawanan pangan, hal ini telah dapat upaya antisipasi dan peningkatan kewaspadaan kemungkinan kerawanan pangan secara dini, dilakukan dengan instrumen SKPG (Sistem

Kewaspadaan Pangan dan Gizi) yang bekerja sama dengan instansi terkait.

5. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi pangan.

Berpedoman pada sasaran WKNPG 2004 target konsumsi energi adalah sebesar 2000kkal/kap/hari. Pada tahun 2015 tingkat konsumsi energi masyarakat kota Payakumbuh sebesar 2.321 kkal/kap/hari atau capaian sebesar 116%.

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

Isu-isu strategis yang menjadi perhatian utama daerah dan terkait dengan isu strategis nasional sesuai dengan tupoksi Kantor Ketahanan Pangan adalah :

1. Ketersediaan dan Kerawanan Pangan

Ketahanan pangan pada tataran nasional, merupakan kemampuan suatu bangsa untuk menjamin seluruh penduduknya memperoleh pangan dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak, aman, dan halal, yang didasarkan pada optimalisasi pemanfaatan dan berbasis keragaman sumberdaya lokal. Terkait definisi tersebut, maka permasalahan ketersediaan dan kerawanan pangan dihadapkan pada :

a. Produksi dan kapasitas produksi pangan Kota Payakumbuh semakin terbatas, karena:

- 1) berlanjutnya konversi lahan pertanian ke penggunaan non pertanian;
- 2) menurunnya kualitas dan kesuburan lahan akibat kerusakan lingkungan;
- 3) tingginya kerusakan lingkungan akibat perubahan iklim serta bencana alam, sehingga kualitas lingkungan dan fungsi perlindungan alamiah semakin berkurang;
- 4) masih tingginya proporsi kehilangan hasil panen (Lossis) pada proses produksi, penanganan hasil

- panen, dan pengolahan pasca panen, yang berdampak pada penurunan kemampuan penyediaan pangan;
- 5) tidak terealisasinya harga eceran tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;
 - 6) terbatasnya dukungan permodalan di kelurahan;
 - 7) lambatnya penerapan teknologi akibat kurangnya insentif ekonomi;
 - 8) masih berlanjutnya pemotongan ternak betina produktif sebagai sumber protein hewani;
 - 9) adanya gangguan hama dan penyakit pada tanaman dan ternak, sehingga mengganggu upaya peningkatan produktivitas; serta
 - 10) masih terbatasnya manajemen kelembagaan tani
- b. Jumlah permintaan pangan semakin meningkat, seiring dengan peningkatan jumlah penduduk, pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, dan berkembangnya penggunaan pangan seiring maraknya perkembangan pariwisata, hotel, dan rumah makan/restoran.
 - c. Adanya persaingan penggunaan bahan pangan untuk bio energy dan pakan ternak.
 - d. Kerawanan pangan, karena adanya kemiskinan, terbatasnya penyediaan infrastruktur dasar pedesaan, potensi sumberdaya pangan yang rendah, rentannya kesehatan masyarakat miskin, dan sering terjadinya bencana alam.
 - e. Hasil analisis ketersediaan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program
 - f. Pembinaan dan pemberdayaan kemandirian pangan pada desa rawan pangan dan kelompok masyarakat rawan pangan dihadapkan pada kendala sarana dan infrastuktur serta kemampuan SDM tenaga pendamping dan penyuluh lapangan.
 - g. Penyediaan hasil analisis, peta kerawanan pangan serta hasil kajian

- h. Hasil kajian akses pangan belum ditindaklanjuti dengan kegiatan intervensi sehingga bila terjadi masalah yang berkaitan dengan akses tersebut belum bisa dilakukan upaya pemecahannya secara optimal.
- i. Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) sebagai instrumen isyarat dini (*early warning system*) pencegahan kerawanan pangan belum optimal dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

2. Distribusi, Harga dan Cadangan Pangan

Stabilitas pasokan dan harga merupakan indikator penting yang menunjukkan kinerja subsistem distribusi. Beberapa permasalahan terkait dengan aspek distribusi, yaitu belum memadainya prasarana dan sarana distribusi untuk menghubungkan lokasi produsen dengan konsumen di seluruh wilayah yang menyebabkan kurang terjaminnya kelancaran arus distribusi pangan. Hal ini dapat menghambat akses fisik dan berpotensi memicu kenaikan harga, sehingga dapat menurunkan kualitas konsumsi pangan. Ketidaklancaran proses distribusi juga merugikan produsen, karena di samping biaya pemasaran yang mahal, hasil pertanian merupakan komoditi yang mudah susut dan rusak. Selain itu, ketidakstabilan harga memberatkan petani. Dengan sifat produksi yang musiman, penurunan harga pada saat panen cenderung merugikan petani. Sebaliknya, pada saat tertentu, harga pangan meningkat dan menekan konsumen, tetapi peningkatan harga tersebut tidak banyak dinikmati para petani sebagai produsen.

Permasalahan lainnya adanya pengaruh melonjaknya harga pangan dunia, misalnya beras dan kedelai sebagai akibat kenaikan harga di dalam negeri karena ketergantungan terhadap ekspor pangan. Permasalahan dalam proses distribusi pangan antara lain adalah terbatasnya dan/atau kurang memadainya sarana dan prasarana transportasi, kondisi iklim yang tidak menentu (akibat kondisi musim hujan yang tidak bersahabat,

sehingga banyak jalan yang rusak, karena bencana banjir, atau longsor) yang dapat mengganggu transportasi bahan pangan. Permasalahan teknis dalam proses distribusi ini berdampak terhadap melonjaknya ongkos angkut. Konsekuensi dari ongkos angkut yang tinggi akan berdampak terhadap harga pada tingkat konsumen akan melonjak. Sebaliknya, harga pada tingkat produsen akan jatuh. Tingginya harga pangan mengakibatkan aksesibilitas konsumen secara ekonomi menurun. Maka kondisi ketahanan pangan tentu terganggu.

Lamanya waktu tempuh dalam pengangkutan bahan pangan segar pada saat terjadi gangguan transportasi, baik karena kondisi infrastruktur jalan maupun cuaca, akan memperbesar persentase bahan pangan yang rusak. Masalah kelangkaan pangan di suatu wilayah berdampak terhadap harga-harga pangan akan melambung sangat tinggi yang berakibat pada terlampauinya tingkat inflasi dari tingkat inflasi yang telah ditetapkan.

Walaupun pemerintah telah menjamin kecukupan stok beras, namun kecukupan stok pangan tersebut tidak dapat menjamin stok pangan di pasar cukup sehingga jika stok di pasar tidak cukup maka akan berdampak terhadap harga pangan di pasar dapat membumbung tinggi.

3. Penganekaragaman, Pola Konsumsi Pangan, dan Keamanan Pangan

Kualitas dan kuantitas konsumsi pangan sebagian besar masyarakat masih rendah, yang dicirikan pada pencapaian Pola Pangan Harapan (PPH). Kondisi tersebut, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan penganekaragaman konsumsi pangan menuju pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman, antara lain:

keterbatasan kemampuan ekonomi dari keluarga;

- 1) keterbatasan pengetahuan dan kesadaran tentang pangan dan gizi;

- 2) adanya kecenderungan penurunan proporsi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal;
- 3) lambatnya perkembangan, penyebaran, dan penyerapan teknologi pengolahan pangan lokal untuk meningkatkan kepraktisan dalam pengolahan, nilai gizi, nilai ekonomi, nilai sosial, citra, dan daya terima;
- 4) adanya pengaruh globalisasi industri pangan siap saji yang berbasis bahan impor, khususnya gandum;
- 5) adanya pengaruh nilai-nilai budaya kebiasaan makan yang tidak selaras dengan prinsip konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

Sampai saat ini, pembinaan dan sosialisasi penganeekaragaman konsumsi pangan yang dilakukan Kantor Ketahanan Pangan diakui masih belum optimal, yang ditandai oleh :

- a) keterbatasan dalam memberikan dukungan program bagi dunia usaha dan asosiasi yang mengembangkan aneka produk olahan pangan lokal;
- b) kurangnya fasilitasi pemberdayaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan aksesibilitas pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman;
- c) dukungan sosialisasi, promosi dalam penganeekaragaman konsumsi pangan melalui berbagai media, masih terbatas dan
- d) masih sedikitnya informasi menu/kuliner berbasis pangan lokal.

Berbagai kasus gangguan kesehatan manusia akibat mengkonsumsi pangan yang tidak aman oleh cemaran berbagai jenis bahan kimia, biologis, dan fisik lainnya yang membawa penyakit, telah terjadi di berbagai daerah bahkan tergolong sebagai Kejadian Luar Biasa (KLB). Kasus-kasus pangan hewani yang terkena wabah penyakit antraks, penyakit flu burung, beredarnya bahan makanan dan minuman olahan tanpa izin edar serta melanggar ketentuan batas kadaluarsa, dan penggunaan bahan

tambahan pangan terlarang, dapat membahayakan kesehatan bahkan menyebabkan kematian.

Hasil pemantuan dan evaluasi menunjukkan, bahwa masih banyak permasalahan yang dihadapi dalam penanganan keamanan pangan, antara lain:

- a) kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat produsen dan konsumen terhadap pentingnya keamanan pangan, terutama pada produk pangan segar;
- b) belum dipahami dan diterapkannya cara-cara budidaya dan produksi pertanian yang baik dan benar;
- c) belum optimalnya kontrol penggunaan pestisida, bahan kimia, dan bahan tambahan pengawet;
- d) masih buruknya praktek-praktek sanitasi dan higiene dalam produksi;
- e) belum adanya ketentuan teknis tentang kewajiban peritel untuk menerapkan Good Retail Practices (GRP);
- f) masih rendahnya kesadaran para ritel untuk menjual produk segar yang aman dan bermutu;
- g) belum efektifnya penanganan dan pengawasan keamanan pangan, karena sistem yang dikembangkan, SDM, dan pedoman masih terbatas;
- h) terbatasnya laboratorium yang telah terakreditasi;
- i) merebaknya penyalahgunaan bahan kimia berbahaya untuk pangan segar;
- j) standar keamanan pangan untuk sayur dan buah segar impor belum jelas diterapkan, sehingga buah impor yang belum terjamin keamanannya masih mudah masuk ke dalam negeri;
- k) belum ada penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar hukum di bidang pangan segar;
- l) koordinasi lintas sektor dan subsektor terkait dengan keamanan pangan belum optimal; dan

m) kurangnya kesadaran pihak pengusaha/pengelola pangan untuk menerapkan peraturan/standar yang telah ada.

4. Kelembagaan dan Manajemen Ketahanan Pangan

Kelembagaan dan manajemen ketahanan pangan sebagai aspek non teknis, merupakan salah satu faktor penentu dalam keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Berbagai permasalahan yang dihadapi perlu ditanggulangi secara terkoordinasi, antara lain:

- a. Pemahaman dan komitmen pemerintah daerah masih rendah tentang kelembagaan yang menangani ketahanan pangan sebagai Unit Kerja belum seperti yang diinginkan, dan belum optimalnya peran dan fungsi Dewan Ketahanan Pangan (DKP) sebagai lembaga fungsional koordinator dalam penanganan ketahanan pangan di daerahnya.
- b. Bentuk lembaga/unit kerja ketahanan pangan yang dibentuk di Provinsi dan kabupaten/kota belum memiliki keseragaman nomenklatur, sehingga penyelenggaraan pembangunan ketahanan pangan belum optimal.
- c. Komitmen dan langkah nyata pemerintah daerah Kota Payakumbuh belum optimal untuk membangun ketahanan pangan berkelanjutan.
- d. Pengembangan model pemberdayaan masyarakat yang didukung oleh pemerintah daerah belum dilakukan secara berkesinambungan.
- e. Pelaksanaan monitoring dan pemantauan program ketahanan pangan kurang optimal sehingga masih perlu ditingkatkan,
- f. Hasil analisis ketahanan pangan belum dimanfaatkan secara maksimal sebagai dasar perencanaan dan pelaksanaan program,

- g. Tersedianya teknologi komunikasi dan informasi yang belum dimanfaatkan secara optimal dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian program,
- h. Belum terlaksananya kegiatan ketahanan pangan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketahanan Pangan.

III. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN PENDANAAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan terhadap pembangunan ketahanan pangan di daerah, yang menyatakan bahwa pembangunan ketahanan pangan menjadi program prioritas yang utama. Arah pembangunan ketahanan pangan juga mengacu pada hasil KTT Pangan 2009, yang antara lain menyepakati untuk menjamin pelaksanaan langkah-langkah yang mendesak pada tingkat nasional, regional dan global untuk merealisasikan secara penuh komitmen *Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2000 dan Deklarasi *World Food Summit* (WFS) 1996, untuk mengurangi penduduk dunia yang menderita lapar dan malnutrisi.

Dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Ketahanan Pangan Nasional dan kesepakatan KTT pangan, arah kebijakan umum pembangunan ketahanan pangan nasional adalah untuk:

- 1) meningkatkan ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan akses pangan;
- 2) meningkatkan sistem distribusi dan stabilisasi harga dan cadangan pangan;
- 3) meningkatkan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan dan kerawanan pangan diarahkan untuk:

- 1) meningkatkan dan menjamin kelangsungan produksi dalam daerah menuju kemandirian pangan;
- 2) mencegah dan menanggulangi kondisi rawan pangan secara dinamis;

- 3) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan ketersediaan pangan, peningkatan akses pangan dan penanganan kerawanan pangan.

Dalam aspek peningkatan sistem distribusi, stabilitasi harga dan cadangan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

- 1) mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan;
- 2) mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergis dan partisipatif;
- 3) mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan distribusi, harga dan cadangan pangan; dan
- 4) meningkatkan peran serta kelembagaan masyarakat dalam kelancaran distribusi, kestabilan harga dan cadangan pangan.

Sedangkan pada aspek peningkatan pemenuhan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan, kebijakan ketahanan pangan diarahkan untuk:

mempercepat penganekaragaman konsumsi pangan berbasis pangan lokal;

mengembangkan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras dan non terigu, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial;

meningkatkan pengawasan keamanan pangan segar;

mengembangkan koordinasi sinergis lintas sektor dalam pengelolaan konsumsi dan keamanan pangan.

Dalam pelaksanaan implementasi kebijakan-kebijakan tersebut, diperlukan dukungan kebijakan, antara lain:

- a) peningkatan dukungan penelitian dan pengembangan pangan;
- b) peningkatan kerjasama dengan mitra kerja,
- c) peningkatan pemberdayaan dan peranserta masyarakat;
- d) penguatan kelembagaan dan koordinasi ketahanan pangan; serta
- e) dorongan terciptanya kebijakan makro ekonomi dan perdagangan yang kondusif bagi ketahanan pangan.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

1. Tujuan

Tujuan dari kegiatan pembangunan ketahanan pangan adalah:

- a) Terpenuhinya pangan dengan kondisi ketersediaan yang cukup, diartikan ketersediaan pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan atas karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral serta turunannya yang bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia.
- b) Terpenuhinya pangan dengan kondisi terjangkau diartikan pangan yang mudah diperoleh rumah tangga dengan harga yang terjangkau
- c) Mengembangkan jaringan dan sistem koordinasi lintas pelaku, lintas wilayah dan lintas waktu guna mensinkronkan kebijakan program dan kegiatan pemantapan ketahanan pangan

- d) Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang aman diartikan bebas dari cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia, serta aman dari kaidah agama
- e) Terpenuhinya pangan dengan kondisi yang merata diartikan pangan yang harus tersedia setiap saat dan merata di seluruh wilayah Payakumbuh baik dalam keadaan normal maupun dalam keadaan bencana.

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai dalam rencana strategis Dinas Ketahanan Pangan adalah:

1. Dipertahankannya ketersediaan pangan yang cukup,
2. Terwujudnya distribusi dan stabilitas harga pangan strategis,
3. Meningkatnya kemandirian masyarakat dalam pemantapan ketahanan pangan,
4. Mengeliminir kondisi rawan pangan,
5. Meningkatnya keanekaragaman konsumsi ditandai dengan menurunnya ketergantungan pada pangan pokok beras
6. Terwujudnya penurunan konsumsi beras 2.5 % / tahun
7. Terwujudnya Pola Pangan Harapan (PPH) yang ideal
8. Terwujudnya Program Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)

3.3. Program dan Kegiatan Yang mengalami Perubahan Tahun 2019

Program dan kegiatan yang direncanakan mengalami perubahan Tahun 2019 adalah :

A. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Target Capaian Program Tahun 2018:

Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat BB :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

Mengalami perubahan pada :

- Pengurangan anggaran sebesar Rp. 8.400.000,-

Pengurangan ini dilakukan untuk disebabkan karena biaya internet yang dahulu dianggarkan telah dibayar oleh Dinas Kominfo.

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional.

Mengalami perubahan pada :

- Tolak Ukur Kinerja
- Penambahan anggaran sebesar Rp. 1.060.000,-

Penambahan ini dilakukan karena adanya tambahan kendaraan dinas dan pergantian STNK

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Mengalami perubahan pada :

- Pengurangan anggaran sebesar Rp. 20.897.792,-
- Latar belakang perubahan karena terjadinya mutasi, cuti dan perubahan anggaran pada satuan biaya honor

4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Mengalami perubahan pada :

- Tolak Ukur Kinerja,
- Penambahan anggaran sebesar Rp. 983.800,-

Adanya penambahan pada fotocopy, dimana anggaran untuk fotocopy masih tidak mencukupi

5. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Mengalami perubahan pada :

- Pengurangan anggaran sebesar Rp. 261.250,-

Adanya pengurangan karena merupakan sisa dana kegiatan.

6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Mengalami perubahan pada :

- Tolak Ukur Kinerja
- Penambahan anggaran sebesar Rp. 30.000.000,

Penambahan ini dilakukan untuk membeli 2 unit laptop dan 2 unit printer

7. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Mengalami perubahan pada :

- Tolok Ukur Kinerja
- Penambahan Anggaran sebesar Rp. 55.668.000,- dilakukan karena menyesuaikan dengan kebutuhan Dinas untuk melakukan kegiatan yang memerlukan koordinasi / konsultasi dengan Pusat.

B. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Target Capaian Program Tahun 2019:

Kegiatan :

1. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Mengalami perubahan pada :

- Tolok Ukur Kinerja
- Penambahan anggaran sebesar Rp. 15.781.400,-

Penambahan anggaran dilakukan karena tidak mencukupi kebutuhan BBM untuk 1 tahun

C. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Target Capaian Program Tahun 2019 :

Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya

Mengalami perubahan pada :

- Tolok Ukur Kinerja

- Pengurangan anggaran sebesar Rp. 2.250.000,-

Pengurangan anggaran dilakukan karena merupakan sisa dari kegiatan.

D. Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan.

Target Capaian Program Tahun 2019 :

- Skor PPH Ketersediaan 86
- Stabilitas harga beras ($\leq 10\%$) , cabe ($\leq 25\%$), bawang ($\leq 10\%$)
- Stabilitas Pasokan $\geq 77\%$

Kegiatan :

1. Analisis dan penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan

Mengalami perubahan pada :

- Pengurangan anggaran sebesar Rp. 5.943.000,-

Pengurangan dilakukan pada volume makan dan minum dalam kegiatan untuk efisiensi anggaran

2. Pemantauan dan analisis akses harga pangan pokok

Mengalami perubahan pada :

- Tolok Ukur Kinerja

- Pengurangan Anggaran sebesar Rp. 1.650.000,-

Pengurangan dilakukan pada volume makan dan minum kegiatan untuk efisiensi anggaran

3. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah

Mengalami perubahan pada :

- Tolok Ukur Kinerja

- Pengurangan anggaran sebesar Rp. 148.010,-

Pengurangan dilakukan karena merupakan dana sisa kegiatan

4. Pengembangan Desa Mandiri Pangan

Mengalami perubahan pada :

- Tolok Ukur Kinerja
- Pengurangan anggaran sebesar Rp. 4.852.000,-

Pengurangan dilakukan pada volume makan dan minum kegiatan untuk efisiensi anggaran serta adanya dana sisa kegiatan.

5. Koordinasi Pengkajian Perumusan Kebijakan Ketahanan Pangan

Mengalami perubahan pada :

- Pengurangan anggaran sebesar Rp. 6.746.250,-
- Pengurangan dilakukan pada hadiah lomba APN yang pada tahun ini tidak dilaksanakan lomba tingkat Kota

6. Koordinasi Pengawasan Pembinaan dan Pemantauan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

Mengalami perubahan pada :

- Pengurangan Anggaran sebesar Rp. 4.270.000,-

Pengurangan dilakukan pada biaya perjalanan dinas dalam daerah untuk masyarakat

E. Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan

Kegiatan :

1. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan

Mengalami perubahan pada :

- Pengurangan anggaran sebesar Rp. 48.075.000,-

Pengurangan dilakukan karena semua dana terletak pada Triwulan IV, sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah dibuat dan pada kegiatan Gertam Cabe harga pembelian bibit cabe per batang Rp. 350,- tapi dalam DPA tertulis Rp. 350.000/batang

2. Pengembangan dan Pembinaan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu

Mengalami perubahan pada :

- Pengurangan anggaran sebesar Rp. 399,-

Pengurangan dilakukan karena penyesuaian harga barang dan jasa (ATK dan perjalanan)

3. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan

Mengalami perubahan pada beberapa rekening belanja yang dilakukan pergeseran antar rekening

Untuk lebih jelasnya berikut kami lampirkan RKA Perubahan 2019.

IV. PENUTUP

Secara umum isi Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2019 mencakup tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program kerja dan kegiatan-kegiatan yang mengacu kepada Renstra Dinas Ketahanan Pangan tahun 2017-2022 dan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022.

Kinerja yang telah dicapai dari pelaksanaan kegiatan pembangunan ketahanan pangan sampai saat ini harus dapat terus ditingkatkan untuk kegiatan tahun berikutnya, sejalan dengan makin mantapnya pemahaman tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan serta seiring dengan budaya kerja profesional yang mengedepankan efisiensi dan efektivitas dan kualitas hasil kerja.

Menyadari bahwa kemampuan sumber daya yang ada pada Dinas Ketahanan Pangan sangat terbatas terutama kuantitas personil, maka guna mewujudkan agar tercapainya sasaran pembangunan ketahanan pangan sangat diperlukan dukungan berbagai pihak terutama stake holder terkait baik pemerintah maupun swasta, dan yang tidak kalah penting adalah adanya peran serta aktif dari masyarakat.

Payakumbuh, Agustus 2019
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN
KOTA PAYAKUMBUH



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

**EVALUASI HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN BULAN MEI TAHUN 2019 KOTA PAYAKUMBUH
DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH**

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2022 (TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA s/d RENJA TAHUN 2018		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D BULAN MEI TAHUN 2019				CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D BULAN MEI THN 2019		
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10 = 8/6		11=9/7		
											Realisasi Kinerja Renja	Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)	Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)	
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10 = 8/6	11=9/7	12 = 5+9	13 = 12/4	
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Nilai IKM	89		80,11		83								
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah benda pos materai 6000 ,materai 3000 dan cheque	2922 bh	12,178,000	materai 1152 bh	4,416,000	626 buah	2,669,000	252 bh	1,170,000	40.26		44	5,586,000	45.87
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Jumlah rekening jasa telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	3 rek,	142,700,000	3 rekening 2 tahun	27,588,613	3 rek	23,400,000	3 rekening	4,095,869	100		18	31,684,482	22.20
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	173 unit	30,206,250	60 unit 16 jenis	6,463,000	29 unit	4,800,500	12 unit	1,565,750	41.38		33	8,028,750	26.58
4	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	51 unit	21,703,000	14 unit	4,474,500	9 unit	2,580,000	0 unit	0	0		0	4,474,500	20.62
5	penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah jasa pengelolaan administrasi keuangan kantor	171 org	1,161,323,656	42 orang	274,667,464	38 org	246,348,000	38 orang	83,216,321	100.00		34	357,883,785	30.82
6	penyediaan jasa kebersihan kantor	- Jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor	96 jenis	63,483,339	16 jenis	27,100,965	21 jenis	2,456,015	14 jenis	1,191,605	66.67		49	28,292,570	44.57
7	penyediaan alat tulis kantor	Jumlah alat tulis kantor	185 item	73,332,850	57 item	22,600,425	34 item	10,700,600	20 item	4,816,700	58.82		45	27,417,125	37.39
8	penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	484 buku, 1499 bh, 91136 lbr, 151 jilid	68,356,962	188 bk, 2 rim, 20.295 lbr, 100bh, 20 jilid	15,754,200	86 bk, 330 bh, 18.857 lbr, 36 jilid	10,004,400	30 buku	4,747,500	34.88		47	20,501,700	29.99
9	Penyediaan komponen Instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung	44 jenis	12,847,000	8 jenis	4,488,500	7 jenis	1,711,750	5 jenis	1,450,500	71.43		85	5,939,000	46.23
10	penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	17 unit	114,302,000	7 unit	43,935,000	3 unit	14,000,000	1 unit	13,650,000	33.33		98	57,585,000	50.38

2,038,676

291,000

1,483,088

3,812,764

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2022 (TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA s/d RENJA TAHUN 2018		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D BULAN MEI TAHUN 2019				CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D BULAN MEI THN 2019	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
									K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10 = 8/6	11=9/7	12 = 5+9	13 = 12/4
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
11	penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan surat kabar dan majalah	24 media	65,480,000	4 media	20,865,000	4 media	10,440,000	4 media	3,480,000	100		33 24,345,000	37.18
12	penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan minum dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas	3755 porsi	65,254,000	614 porsi	13,683,450	730 porsi	10,037,500	448 porsi	4,488,000	61.37		45 18,171,450	27.85
13	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi KLD	Jumlah koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	1 tahun	956,446,605	161 kal1, 79 k	261,102,146	170 oh, 108 oh	241,830,000	58 oh	97,268,874	53.70		40 358,371,020	37.47
				2,787,613,662		727,139,263		580,977,765		221,141,119				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										38.06				
Predikat Kinerja										sangat rendah				
II	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80%		80%		80%							
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas	6 unit roda 2 1 unit roda 4	446,000,000	4 unit	73,444,000	-	0	-	0	0		0 73,444,000	16.47
2	Pengadaan Mebeleur	Jumlah pengadaan mebeleur	40 unit	318,450,000	4 item	148,410,000	-	0	-	0	0		0 148,410,000	46.60
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas / operasional roda 4 dan roda 2	96 unit	550,775,000	15 unit	122,806,528	11 unit	67,522,600	11 unit	24,631,050	100		36 147,437,578	26.77
				1,315,225,000		344,660,528		67,522,600		24,631,050				
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										36.47823099				
Predikat Kinerja										sangat rendah				
III	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100%		100%		100%							
1	Penyediaan pakaian dinas beserta perlengkapan	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang disediakan	171 stel	89,450,000	48 stel	22,080,000	30 stel	13,500,000	25 stel	11,250,000	83.33		83 33,330,000	37.26
				89,450,000										
Rata-rata Capaian Kinerja (%)										83.33333333				
Predikat Kinerja										TINGGI				

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2022 (TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA s/d RENJA TAHUN 2018		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D BULAN MEI TAHUN 2019				CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D BULAN MEI THN 2019	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	Realisasi Kinerja Renja		Realisasi Tingkat Capaian Kinerja (%)		Realisasi Target	Realisasi Tingkat Capaian Target (%)
									K	Rp	K	Rp		
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10 = 8/6	11=9/7	12 = 5+9	13 = 12/4
5	Koordinasi pengawalan pembinaan dan pemantauan distribusi pangan masyarakat (LDPM)	jumlah koordinasi dan pembinaan LDPM, PUPM/TTI dan LPM	120 kali	361,409,599	40 kali	52,548,971	20 kali	8,892,000	-	1,056,500	100	12	53,605,471	14.83
6	pengembangan desa mandiri pangan	- jumlah kelompok pelaksana Desa Mandiri Pangan - jumlah Desa Mandiri Pangan yang dibina	50 kelompok, 6 kelurahan	647,785,000	1 kel, 4 kel	89,321,250	1 kel, 4 kel	43,041,520	-	25,547,750	100	59	114,869,000	17.73
VI	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	a. % masy yg mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE b. % penurunan konsumsi beras c. % bahan pangan yang aman dikonsumsi	a. 60% b. 5% c. 90%	a.45% b. 5% c. 82%	a. - b. - c. -									
1	peningkatan mutu dan keamanan pangan	- Jumlah pelaksanaan Lomba Cipta Menu Tingkat Kota dan tingkat Provinsi - Jumlah uji sampel pangan segar yang beredar di masyarakat - Jumlah peserta sosialisasi pangan B2SA - Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan	12 kali, 20 kali, 210 orang, 260 org	492,250,000	4 kali, 8 kali, 60 org, 60 org	288,282,280	2 kali, 4 kali, 30 org, 30 org	100,776,000	2 kali, 30 org, 30 org	17,754,700	50	18	306,036,980	62.17
2	pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan	- Jumlah peserta sekolah lapang optimalisasi pekarangan - jumlah KWT penerima bantuan benih sayuran, polybag dan kompos - jumlah dasawisma penerima bantuan benih sayuran, polybag dan kompos - jumlah kelurahan percontohan KRPL - jumlah buku PPH Konsumsi	30 KWT, 90 KWT, 165 Dasawisma, 15 kelurahan, 5 dok	3,643,129,628	5 KWT, 5 KWT, 25 Dasawisma, 3 kelurahan, 1 dokumen	841,646,283	5 KWT, 1 kali, 5 KWT, 25 dasawisma, 3 kel, 1 dok	713,134,400	-	0	0	0	841,646,283	23.10

NO	URUSAN / BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET CAPAIAN KINERJA RENSTRA TAHUN 2022 (TAHUN AKHIR PERIODE RENSTRA)		REALISASI CAPAIAN KINERJA RENSTRA s/d RENJA TAHUN 2018		TARGET KINERJA ANGGARAN RENJA TAHUN 2019		REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D BULAN MEI TAHUN 2019				CAPAIAN TARGET RENSTRA S/D BULAN MEI THN 2019			
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	10 = 8/6 K Rp		11=9/7 K Rp		12 = 5+9	13 = 12/4
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10 = 8/6		11=9/7		12 = 5+9	13 = 12/4
3	pengembangan dan pembinaan pangan lokal non beras non terigu	- jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal non beras non terigu, - jumlah lomba pengolahan pangan lokal non beras non terigu	260 org, 6 kali	589,274,049	60 org, 2 kali	162,434,828	30 org, 1 kali	38,304,299	-	26,285,100	50	69	188,719,928	32.03		
Predikat Kinerja dari Seluruh Program																
				22,725,986,382		1,748,776,402		1,014,345,169		79,468,125						
JUMLAH						2,859,403,543		1,683,314,099		337,966,919						
Rata-rata Capaian Kinerja (%)											20.07747212					
Predikat Kinerja											sangat rendah					
Total Rata-rata Capaian Kinerja dan Anggaran dari Seluruh Program (%)											20.07747212					
											sangat rendah					

Payakumbuh, 19 Juni 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PADA PERUBAHAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA PAYAKUMBUH

DINAS KETAHANAN PANGAN

1 09 01

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (tahun berjalan)								Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan				
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12	13 = 12 - 11	14	15	16	17	18	19
09 01 01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Lancarnya aktifitas perkantoran	Nilai IKM			83	83									
	Kegiatan:															
	01 Penyediaan Jasa surat menyurat	Jumlah benda pos materai 6000 dan materai 3000	Jumlah benda pos , materai 6000 dan materai 3000, buku cek	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	626 buah	626 buah	2,669,000	2,669,000	-	APBD	APBD	421 bh	1,869,000	Rutin	DKP
	02 Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	Jumlah rekening telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah rekening telekomunikasi, sumber daya air dan listrik	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	1 rekening listrik, 1 rekening telepon, 1 rekening air	1 rekening listrik, 1 rekening telepon, 1 rekening air	23,400,000	15,000,000	(8,400,000)	APBD	APBD	3 rek	17,280,000	Rutin	DKP
	03 Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah jasa perbaikan peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	29 unit	29 unit	4,800,500	4,800,500	-	APBD	APBD	20 unit	2,702,500	Rutin	DKP
	06 Penyediaan Jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	roda empat 3 unit, roda dua 6 unit	roda empat 3 unit, roda dua 8 unit	2,580,000	3,640,000	1,060,000	APBD	APBD	11 unit	4,000,000	Rutin	DKP
	07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan	Jumlah jasa pengelola administrasi keuangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	32 org	32 org	246,348,000	225,450,208	(20,897,792)	APBD	APBD	44 org	229,663,752	Rutin	DKP
	08 Penyediaan Jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor	Jumlah jasa kebersihan kantor, jumlah bahan dan peralatan kebersihan kantor	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	21 jenis	21 jenis	2,456,015	2,456,015	-	APBD	APBD	21 jenis	2,515,050	Rutin	DKP
	10 Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Jumlah Alat Tulis Kantor	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	34 item	34 item	10,700,600	10,700,600	-	APBD	APBD	33 item	13,795,075	Rutin	DKP
	02 Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Jumlah barang cetakan, penggandaan dan penjilidan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	86 buku, 330 bh, 18.857 lbr, 36 jilid	86 buku, 330 buah, 23776 lbr, 27 jilid	10,004,400	10,988,200	983,800	APBD	APBD	64 buku, 15000 lbr, 18 jilid	8,728,500	Rutin	DKP
	12 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan gedung	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan gedung	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	7 jenis	7 jenis	1,711,750	1,450,500	(261,250)	APBD	APBD	4 jenis	1,615,750	Rutin	DKP
	13 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	3 unit	7 unit	14,000,000	44,000,000	30,000,000	APBD	APBD	8 unit	69,057,500	Rutin	DKP

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (tahun berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/b/c	1/2/3					
	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah	Jumlah bahan bacaan berupa surat kabar dan majalah	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	4 media	4 media	10,440,000	10,440,000	-	APBD	APBD	2 media	8,395,000	Rutin	DKP
	16	Penyediaan Makanan dan minuman	Jumlah makan minum dlm rangka mendukung pelaksanaan tugas	Jumlah makan minum dlm rangka mendukung pelaksanaan tugas	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	730 porsi	730 porsi	10,037,500	10,037,500	-	APBD	APBD	750 porsi	10,725,000	Rutin	DKP
	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam, dan luar daerah	Jumlah koordinasi dan konsultasi dalam, dan luar daerah	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	d/m daerah 170 oh, luar daerah 108 oh	d/m daerah 170 oh, luar daerah 173 oh	241,830,000	297,498,000	55,668,000	APBD	APBD	228 oh d/m daerah, 96 oh luar daerah	384,935,000	Rutin	DKP
09 01	02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Lancarnya aktifitas perkantoran	Persentase sarana dan prasarana kantor dalam kondisi baik			100%	100%									
	24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional ro	Jumlah pemeliharaan rutin kendaraan dinas/operasional roda 4 dan roda 2	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	roda empat 3 unit, roda dua 8 unit	roda empat 3 unit, roda dua 8 unit	67,522,600	83,304,000	15,781,400	APBD	APBD	11 unit	72,600,200	Rutin	DKP
09 01	03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Lancarnya aktifitas perkantoran	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap			100%	100%									
	02	Pengadaan Pakaian Dnas beserta kelengkapannya	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang	Jumlah pakaian dinas dan perlengkapannya yang	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	30 stel	25 stel	13,500,000	11,250,000	(2,250,000)	APBD	APBD	25 stel	11,250,000	Rutin	DKP
09 01	06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tersusunnya laporan capaian kinerja dan ictisar realisasi kinerja SKPD	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	-	-	BB	BB									
	01	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Iktisar realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ictisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ictisar realisasi kinerja SKPD	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	3 dokumen	3 dokumen	3,404,400	3,404,400	-	APBD	APBD	3 dokumen	4,466,475	Rutin	DKP
	07	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	Pegawai Dinas Ketahanan Pangan	4 dokumen	4 dokumen	3,564,165	3,564,165	-	APBD	APBD	4 dokumen	6,526,875	Rutin	DKP
03 01	16	Program Ketersediaan dan Distribusi Pangan	a.% bahan pangan yang telah memenuhi AKE b. % cadangan pangan yang tersedia c. cakupan supply lembaga distribusi pangan d. nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan& akses pangan	a.% bahan pangan yang telah memenuhi AKE b. % cadangan pangan yang tersedia c. cakupan supply lembaga distribusi pangan d. nilai capaian ketersediaan informasi harga, pasokan& akses pangan			a.88% b. 21% c. 30% d. 35%	a.88% b. 21% c. 30% d. 35%									
	01	Analisis dan Penyusunan pola konsumsi dan suplai pangan	Jumlah dokumen buku Neraca Bahan Makanan (NBM) dan buku Pola Pangan Harapan (PPH)	Jumlah dokumen buku Neraca Bahan Makanan (NBM) dan buku Pola Pangan Harapan (PPH)	OPD terkait	OPD terkait	2 dokumen	2 dokumen	14,506,000	8,563,000	(5,943,000)	APBD	APBD	2 dokumen	11,008,640	Rutin	DKP
Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (tahun berjalan)										Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg	Perangkat Daerah Penanggung jawab
				Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	a/b/c	1/2/3					

		11	Pemantauan dan Analisis akses harga pangan pokok	- Jumlah pemantauan dan analisis harga pangan	- Jumlah pemantauan dan analisis harga pangan	harga di konsumen dan produsen	harga di konsumen dan produsen	52 kali	52 kali	8,866,500	7,216,500	(1,650,000)			52 kali	7,216,485		
				- Jumlah dokumen perkembangan analisis harga pangan	- Jumlah dokumen perkembangan analisis harga pangan			1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
		13	Pengembangan cadangan pangan daerah	- Jumlah cadangan pangan pemerintah yang diadakan	- Jumlah cadangan pangan pemerintah yang diadakan	masyarakat terdampak bencana	masyarakat terdampak bencana	3 ton	2566 KG	32,788,000	32,639,990	(148,010)			6950 kg	93,615,760		
		14	Pengembangan Desa Mandiri Pangan	- Jumlah pelaksana desa mandiri pangan tahap pengembangan	- Jumlah pelaksana Desa Mandiri Pangan	Kelompok Tani / kelurahan mandiri pangan	Kelompok Tani / kelurahan mandiri pangan	1 kelurahan	1 kelurahan	43,041,520	38,189,520	(4,852,000)			1 kelurahan	28,616,310		
				- Jumlah Desa Mandiri Pangan lanjutan yang diminta	- Jumlah Desa Mandiri Pangan lanjutan yang dibina			4 kelurahan	4 kelurahan						4 kelurahan			
		32	Koordinasi pengkajian perumusan kebijakan ketahanan pangan	- Jumlah rakor Dewan Ketahanan Pangan	- Jumlah rakor Dewan Ketahanan Pangan	Dewan Ketahanan Pangan	Dewan Ketahanan Pangan	2 kali	2 kali	54,036,450	47,290,200	(6,746,250)			2 kali	64,972,300		
				- Jumlah Lomba Ketahanan Pangan (APN) Tahun 2018	- Jumlah Lomba Ketahanan Pangan			2 kali	2 kali						2 kali			
				- Jumlah Peringatan HPS yang diikuti	- Jumlah Peringatan HPS yang diikuti			1 kali	1 kali						1 kali			
		33	Koordinasi Pengawasan, Pembinaan dan Pemantauan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat	- Jumlah koordinasi dan pembinaan LDPM, PUPM/TTI dan LPM	- Jumlah koordinasi dan pembinaan LDPM, PUPM/TTI dan LPM	Gapoktan, LDPM, dan TTI	Gapoktan, LDPM, dan TTI	20 kali	20 kali	8,892,000	4,622,000	(4,270,000)			20 kali	63,474,960		
03	01	17	Program Diversifikasi dan Keamanan Pangan	a. % masy yg mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE b. % penurunan konsumsi beras c. % bahan pangan yang aman dikonsumsi	a. % masy yg mengkonsumsi bahan pangan sesuai standar AKE b. % penurunan konsumsi beras c. % bahan pangan yang aman dikonsumsi			a.45% b. 5% c. 82%	a.45% b. 5% c. 82%									
		17	Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan	- Jumlah kelompok peserta sekolah lapang optimalisasi pekarangan	- Jumlah peserta sekolah lapang optimalisasi pekarangan	KWT, Dasawisma, Kelurahan Percontohan	KWT, Dasawisma, Kelurahan Percontohan	5 KWT	5 KWT	713,134,400	665,059,400	(48,075,000)			5 KWT	274,691,161		
				- Jumlah KWT penerima bantuan benih sayuran, polybag dan kompos	- Jumlah KWT penerima bantuan benih sayuran, polybag dan kompos			20 KWT	20 KWT						5 KWT			
				- Jumlah dasawisma penerima bantuan benih sayuran, polybag dan kompos	- Jumlah dasawisma penerima bantuan benih sayuran, polybag dan kompos			40 Dasawisma	40 Dasawisma						20 Dasawisma			
				- Jumlah kelurahan percontohan KRPL	- Jumlah kelurahan percontohan KRPL			3 kelurahan	3 kelurahan						1 kelurahan			
				- Jumlah dokumen PPH Konsumsi	- Jumlah dokumen PPH Konsumsi			1 dokumen	1 dokumen						1 dokumen			
		02	Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	- Jumlah Lomba Cipta Menu Tk Kota dan Tk Provinsi	- Jumlah Lomba Cipta Menu Tk Kota dan Tk Provinsi	PKK, KWT dan masyarakat (pelaku usaha)	PKK, KWT dan masyarakat (pelaku usaha)	2 kali	2 kali	100,776,000	100,776,000	-	APBD	APBD	2 kali	115,997,540	lanjutan	DKP
				- Jumlah uji sampel pangan segar yang beredar di masyarakat	- Jumlah uji sampel pangan segar yang beredar di masyarakat			47 sampel	47 sampel						4 kali			

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan		Rencana Tahun 2019 (tahun berjalan)									Prakiraan Maju Tahun 2020		Jenis Keg	Perangkat Daerah Penanggung jawab	
		Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Kelompok Sasaran		Target Capaian Kinerja		Pagu Indikatif			Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif			
				Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Jumlah perubahan (+/-)	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan					
		- Jumlah peserta sosialisasi pangan B2SA	- Jumlah peserta sosialisasi pangan B2SA			30 org	30 org										
		- Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan	- Jumlah peserta sosialisasi keamanan pangan			30 org	30 org										
	03 Pengembangan dan Pembinaan Pangan Lokal Non Beras Non Terigu	- Jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal non beras non terigu	- Jumlah peserta pelatihan pengembangan pangan lokal non beras non terigu	KWT, TP-PKK Kelurahan	KWT, TP-PKK Kelurahan	30 org	30 org	38,304,299	38,303,900	Rp (399)	APBD	APBD	60 org	43,299,545	lanjutan	DKP	
		- Jumlah lomba pengolahan pangan lokal non beras non terigu	- Jumlah lomba pengolahan pangan lokal non beras non terigu			1 Kali	1 kali						1 kali				
		JUMLAH						1,683,314,099	1,683,313,598	(501)				1,553,018,378			

Payakumbuh, 19 Juni 2019

Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh



EDVIDEL ARDA, S.IP
NIP. 19700124 199003 1 001

Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2019

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya keberagaman ketersediaan pangan.	1. Skor PPH Ketersediaan	86
2. Meningkatnya Pola Konsumsi Pangan Masyarakat yang beragam, bergizi seimbang dan aman.	2. Skor PPH Konsumsi	82
	3. Tingkat Keamanan Pangan	Sedang
3. Meningkatnya kelancaran distribusi pangan.	4. Stabilitas Harga - Beras - Cabe - Bawang	≤10% ≤25% ≤10%
	5. Stabilitas Pasokan	≥77%
4. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan	6. Nilai Evaluasi AKIP Dinas Ketahanan Pangan	BB

Payakumbuh, Desember 2018
Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kota Payakumbuh



Ir. WAL ASRI, MM

NIP. 19660903 199303 1 005

Catatan : RKT Tahun 2018 ditetapkan pada Desember 2018 dan RKT 2019 di tetapkan pada Desember 2018

